

Jurnal
BORNEO ADMINISTRATOR

Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara



p-ISSN: 1858-0300, e-ISSN: 2407-6767
Anggota ISBN/KDN No. 979-99635-1-6

Vol. 12, No. 3, Desember, Tahun 2016

Jurnal Borneo Administrator diterbitkan 3 kali setahun setiap bulan April, Agustus, dan Desember oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara.

Pengarah:

Kepala PKP2A III LAN

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

Dr. Mariman Darto, M.Si. (Kebijakan Publik)

Dewan Redaksi:

Windra Mariani, S.H., M.H. (Hukum)

Tri Noor Aziza, S.P., M.P. (Administrasi Publik)

Penyunting:

Mayahayati Kusumaningrum, S.E., M.Ec.Dev. (Administrasi Publik)

Fani Heru Wismono, S.E., M.A. (Administrasi Publik)

Wildan Lutfi A., S.E. (Administrasi Publik)

Andi Wahyudi, SIP., M.PubAdmin(Pol). (Administrasi Publik)

Ika Retna Ningrum, S.Pd., MPP. (Bahasa Inggris, Kebijakan Publik)

Mitra Bestari:

Dr. Bevaola Kusumasari (Manajemen Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Dr.rer.publ. Samodra Wibawa, M.Sc. (Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Elly Susanto, Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, M.Si. (Ekonomi, Universitas Mulawarman, Samarinda)

Dr. Riant Nugroho (Kebijakan Publik, Universitas Pertahanan)

Prof. Sarosa H., S.H., M.Hum. (Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda)

Wawan Sobari, M.A., Ph.D. (Politik, Kebijakan Publik, Universitas Brawijaya, Malang)

Redaksi Pelaksana:

Kemal Hidayah, S.H.

Lany Erinda R., S.Sos.

Tri Wahyuni, S.H.

Dewi Sartika, S.E.

Desain Grafis:

Eko M. Rizki Husein

Alamat:

PKP2A III LAN

Jl. H.M. Ardans, SH. (Ring Road III) Samarinda 75124

Email: borneo.jurnal@gmail.com

Website: <http://www.samarinda.lan.go.id/jba>

CALL FOR PAPER:

Redaksi menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang administrasi publik/negara, misalnya kebijakan publik dan manajemen publik, yang orisinal dan belum pernah dimuat di jurnal atau majalah lain. Naskah diketik dalam *Ms Word* menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 15-20 halaman, ukuran A4, huruf *Times New Roman* 12pt, dan spasi tunggal. Naskah dikirim melalui email ke: borneo.jurnal@gmail.com dilengkapi dengan Pernyataan Keaslian Naskah dan CV penulis. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh Redaksi, akan direview oleh Mitra Bebestari (*Reviewers*). Dan terhadap naskah yang dimuat diberikan jurnal dan cetak lepas (*off-print*) serta imbalan kepada penulis. Petunjuk penulisan selengkapnya bisa dilihat di bagian akhir Jurnal *Borneo Administrator*.

Website: <http://www.samarinda.lan.go.id/jba>



Daftar Isi

Dari Sudut Tepian Mahakam

Transformasi *Mind-Set* Pemimpin Daerah 211-216

Analisa

- EFEKTIVITAS UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN
DI KOTA BANDUNG 217-238
Putri Wulandari Atur Rejeki
- MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE* MELALUI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SURAKARTA 239-258
Witra Apdhi Yohanitas
- EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA :
SEBUAH UPAYA MENUJU PERBAIKAN 259-278
Tri Noor Aziza
- PENDEKATAN EKONOMI WILAYAH DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA 279-298
**Maria Agustini Permata Sari, Mayahayati Kusumaningrum,
dan Lia Rosliana**
- EVALUASI KEBIJAKAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD
DALAM PENYELENGARAAN PEMILU TAHUN 2014 299-316
Tatang Sudrajat

Lembar Abstraksi (Current Content) 2016

Indeks Naskah Tahun 2016

Ucapan Terima Kasih

Petunjuk Penulisan



Salam Redaksi

Jurnal ilmiah merupakan suplemen penting saat ini bagi negara-negara yang ingin lebih maju dalam peradaban keilmuannya. Jumlah dan kualitas jurnal adalah indikator yang digunakan untuk melihat perwujudan dari ‘*good will*’ negara apakah negara benar-benar berupaya mengembangkan jurnal keilmiah atau hanya sekedar retorika program semata. Berdasarkan situs olahan pemeringkatan publikasi ilmiah SCImago Lab, dalam kurun waktu 1996 - 2013, Indonesiaberada pada urutan ke-61 dunia dalam hal publikasi ilmiah dengan jumlah publikasi sebanyak 25.481. Peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negeri jiran kita (nasional.sindonews.com, diunduh pada tanggal 19 Januari 2017).Berdasar pada kondisi tersebut, maka menjadi komitmen bagi Redaksi Jurnal Borneo Administratoruntuk berusaha menjaga kontinuitas penerbitan jurnal sekaligus menjaga kualitas tulisan yang akan diterbitkan.

Jurnal Borneo Administrator (JBA) kembalihadir melalui Volume 12 Nomor 3. Di penghujung tahun 2016yang merupakan tahun kerja yang penuh optimism, berbagai isu strategis di bidang keadministrasi negara akan menjadi komoditi JBA untuk berkontribusi aktifdalam menyediakan berbagai referensi kebijakan yang *reliable* karena telah melalui tahap penyuntingan ketat oleh para Mitra Bestari. Inovasi, standar pelayanan minimal, Pendekatan Ekonomi Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan, serta Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014merupakan topik terpilih JBA Volume 12 Nomor 3.

Inovasi sebagai tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, terbidik dalam tulisan yang berjudul **Efektivitas Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung**. Sebagaimana di dalam Pasal 386 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan dalam bidang infrastruktur adalah peluncuran Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan (URCTJ). Dalam melaksanakan kewenangannya, URCTJ bekerja pada jalan dengan kondisi sedang (jalan berlubang) yang telah masuk dalam program pemeliharaan. Selain itu, URCTJ dapat juga bekerja berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika hendak memberikan informasi mengenai jalan rusak adalah dengan menyampaikan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung atau ke kelurahan terdekat. Masyarakat pun dapat menyampaikan keluhannya melalui *short Messages Service* (SMS), telepon, email atau twitter (www.inilah.com). Segera setelah menerima pengaduan, Wali Kota Bandung akan langsung menerjunkan URCTJ, tanpa harus melalui proses pengadaan barang dan jasa yang rumit dan panjang seperti yang biasa dilakukan (www.inovasi.lan.go.id). Terdapat tiga tujuan dari dibentuknya Tim URC Tambal Jalan. Tujuan yang pertama adalah untuk mempertahankan kinerja jalan agar tetap dalam kondisi baik. Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan. Tujuan yang ketiga adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.

Sejalan dengan Kota Bandung yang melakukan Inovasi Unit ReaksiCepat Tambal Jalan, Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan berbagai inovasi untuk perkembangan kotanya



sebagaimana tergambar di dalam artikel **Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta**. Inovasi di Kota Surakarta adalah inovasi yang terkait dengan sasaran yang tertuang dalam Misi Kota Surakarta. Perbaikan yang dilakukan melalui inovasi meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Adapun wujud inovasi yang berhasil dilakukan di Kota Surakarta antara lain :Inovasi Kartu Insentif Anak, Inovasi Digital Arsip Kependudukan, Inovasi Pelayanan KTP Satu Jam, Relokasi Rumah Deret Kampung Keprabon Kota Surakarta, River Tourism Kota Surakarta Melalui Penataan Kawasan Sungai. Dari 10 (sepuluh) poin penutup, yang menarik untuk dicermati sebagai bagian kesempurnaan perwujudan inovasi adalah kemampuan masyarakat dalam membekali diri dengan pengetahuan terhadap program inovatif pemerintah agar dapat berpartisipasi aktif dalam program.

Masih berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara, tulisan selanjutnya berjudul **Penerapandan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda**. Artikel inimerupakan pengembangan dari Kajian Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPD penanggung jawab SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga didapatkan solusi pemecahannya. Dari 16 indikator tersebut, hanya 5 indikator yang dapat memenuhi target capaian nasional. Hal ini disebabkan berbagai kendala berupa kendala substansi SPM, teknis, administrasi, sumber daya, dan sosial.

Masih berbicara tentang Kota samarinda, kali ini yang ingin dibahas selanjutnya dari kota yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah **Pendekatan Ekonomi Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda**. Artikel ini disarikan dari hasil kajian PKP2A III LAN dengan BLDD Kota Samarinda Tahun 2015. Dalam artikelnya tersebutkan bahwa Pemerintahan Kota Samarinda telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034. Berdasarkan klasifikasi sembilan sektor ekonomi atau lapangan usaha di Kota Samarinda, sektor yang sumbangannya paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peranan sektor tersebut selama dua belas tahun terakhir terus meningkat. Pemetaan potensi sumberdaya ekonomi daerah sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah serta optimalisasi ruang gerak ekonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, melengkapi berbagai masalah yang sering muncul di ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, artikel berjudul **Evaluasi Kebijakan Pencalonan Anggota DPRD dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014** akan merepresentasikan terkait persoalan di ruang lingkup penyelenggara pemerintahan (legislatif). Tersebutkan bahwa pemilu merupakan prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan memperbarui kontrak sosial; memilihpemerintahanbaru.



Berkenaan dengan itu, direkomendasikan perlu penyempurnaan substansi pengaturan pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol, surat keterangan atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/model pencalonan serta beberapa kesalahan/inkonsistensi peristilahan.

Terakhir, dalam momen menjelang tutup tahun ini, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada tim redaksi, kepada para mitra bestari serta para penulis yang telah memberikan kontribusi aktif-nya sesuai dengan perannya masing-masing. Selamat tinggal tahun 2016, Selamat datang tahun 2017.

